

## OMBUDSMAN BABEL HARAP PENYALURAN BERAS PPKM KE MASYARAKAT SELESAI 2 AGUSTUS, STAKEHOLDER DIMINTA RESPONSIF

Jum'at, 30 Juli 2021 - Umi Salamah

Pangkalpinang - Ombudsman Babel mengundang Ferry selaku Pimpinan PT Dos Ni Roha (DNR) Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berdiskusi mengenai distribusi bantuan sembako pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagaimana diketahui, Perum Bulog menunjuk PT DNR sebagai transporter penyaluran bantuan beras pada masa PPKM di sekitar 15 Provinsi yang ada di Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, yang langsung melakukan pembahasan terkait kondisi riil lapangan, baik itu dalam hal data, mekanisme penyaluran, sampai dengan kendala yang dihadapi di lapangan saat proses penyaluran oleh PT DNR.

"Data yang digunakan adalah data dari Kementerian Sosial dengan total sekitar 54.090 sasaran keluarga penerima manfaat. Untuk kendala, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti, belum ada misalnya warga protes karena penyaluran tidak tepat sasaran. Sejauh ini hanya kendala sinkronisasi dan komunikasi dengan stakeholder di daerah, misalnya di Bangka Selatan, sehingga penyaluran disana agak jadi terhambat.

Untuk sistem penyaluran di lapangan kami selalu berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten/Kota, Pihak Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan kami melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai koordinator lapangan setiap kelurahan/desa", ungkap Ferry.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pimpinan PT Dos Ni Roha Babel, Yozar berharap proses penyaluran bantuan beras pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan dengan lancar, profesional, dan tepat waktu.

"Kami harap pelaksanaannya sesuai prosedur yang berlaku, profesional, serta dapat disalurkan kepada seluruh sasaran penerima manfaat sampai dengan masa PPKM berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021. Kami juga berharap kepada stakeholder terkait agar terbuka untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Penyalur, harus komunikatif dan responsif sebab hal ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai hanya karena masalah *miss* atau kesulitan komunikasi, bisa-bisa masyarakat terhambat memperoleh hak nya," Ungkap Yozar.

Ferry mengatakan sangat menerima masukan Kepala Ombudsman Babel dan akan mengusahakan penyaluran selesai tanggal 2 Agustus 2021.

"Insyaallah kami akan menyalurkan dengan sebaik-baiknya dan kami upayakan selesai tanggal 02 Agustus 2021. Alhamdulillah, dalam hal penyaluran kita sudah mencapai realisasi sekitar 60%, untuk Pulau Belitung sudah selesai, tinggal penyelesaian di Pulau Bangka. Sementara ini Bangka Belitung secara umum penyalurannya terbaik pertama, kemudian disusul Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Bengkulu secara berturut-turut pada posisi kedua, ketiga, dan keempat. Sekali lagi terimakasih atas masukan dan dukungannya Pak, semoga kita semua dapat senantiasa bersinergi dengan baik." Tutup Ferry.